



Seminar Dies ke-22 Fakultas Sastra
“Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta
dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Sejarah”

KEADILAN DAN TRADISI SOSIAL: Refleksi Ringan Kemajemukan Yogyakarta

oleh

Arie Sujito
Universitas Gadjah Mada



Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | 27 April 2015

KEADILAN DAN TRADISI SOSIAL: Refleksi Ringan Kemajemukan Yogyakarta

*Arie Sujito*¹
Universitas Gadjah Mada

Tulisan ini akan menyajikan beberapa catatan kritis soal pluralisme di Yogyakarta, dengan mengaitkan pada tema keadilan dan tradisi sosial. Sebagai bagian dari refleksi, tentu tidak lepas dari penyederhanaan, sekalipun akan berupaya untuk menghindari distorsi berlebihan. Untuk memenuhi tanggung jawab praksis hasil refleksi, sedikit diusulkan agenda strategis yang dapat dimanfaatkan membantu menjawab problem yang kini menjadi perhatian banyak pihak: mengelola “ketegangan dan harmoni dalam keberagaman”.

Ketegangan sosial sejauh ini

Pengalaman kejadian yang berlangsung di Indonesia berupa rangkaian peristiwa konflik dan eskalasi kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, hal itu makin mempertebal keyakinan bahwa kemajemukan struktur masyarakat Indonesia dihadapkan pada situasi yang cukup rentan. Frekuensi, secara sporadis masih terjadi sebagaimana diperlihatkan dari ekspose media massa sejauh ini, yakni berupa sengketa maupun pertentangan antar kelompok dengan bermacam akar masalah, pemicu, serta besaran korban sebagai akibat yang ditimbulkan, terjadi distorsi besar-besaran. Seolah reformasi justru melahirkan konflik dan kekerasan serta ketidakstabilan.

Konstruksi semacam ini menjalar jadi paham awam, dilengkapi rangkaian pandangan spekulatif. Pada kelangsungan sejumlah episode konflik dan kekerasan di Indonesia sejauh itu hampir tidak luput dari momentum, atau *event-event* politik dan kebijakan. Baik itu terkait langsung maupun tidak langsung. Misalnya, maraknya sengketa destruksi mewarnai pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, pertentangan masyarakat dengan pemerintah dampak pembangunan, serta reaksi-reaksi negatif praktik “drama” hukum di Indonesia, adalah sejumlah contoh-contoh yang mudah ditafsir sebagai seenggok distorsi reformasi dengan cara mengkaitkannya dengan urusan politik.

Saya berpandangan dan sekaligus berposisi, bahwa konflik dan kekerasan itu bukan akibat reformasi. Segala gejala dan bentuk konflik dan kekerasan serta dinamika yang mengitarinya menjadi alat justifikasi secara sepihak dengan serangkaian mantra dengan kandungan hasrat, untuk kembali ke jaman orde baru. Mengapa demikian? Neraca sosial dan konfigurasi politik antara era orde baru dengan jaman reformasi, seolah-olah orde baru tidak memperlihatkan keadaan konflik dan kekerasan dibandingkan jaman reformasi. Tentu saja asumsi itu menyesatkan. Saya menilai, terlalu distortif jika mengkaitkan secara kausalitas antara makin tingginya derajat konflik dan kekerasan berkorelasi positif dengan reformasi. Sesungguhnya reformasi bukan menjadi penyebab langsung maraknya konflik, bahkan kekerasan yang makin membesar. Sebaliknya, justru karena reformasi yang sementara pihak dinilai gagal itulah menyebabkan derajat konflik dan kekerasan meningkat, yang besar kemungkinan akibat dari kerentanan kondisi sosial masyarakat (struktur dan kultur) akibat masa lalu serta rapuhnya tata politik Indonesia dalam menjalankan fase pascaotoriterisme.

Apa yang bisa menjelaskan? Kekuasaan otoriterisme orde baru sesungguhnya memiliki selimut tebal penutup konflik dalam pengertian struktural melalui cara-cara represif agar tidak mencuat ke permukaan. Pada era orde baru paling tidak dikenal tiga praktek politik; depolitisasi, deideologisasi dan *floating mass* (Mohtar Pabottingi, 1997), yang dilandasi oleh paham stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi (Mohtar Mas’oed,

¹ Sosiolog UGM

1989). Dengan cara seperti itu, ruang-ruang ekspresi dan artikulasi sebagai media interaksi, baik secara vertikal maupun horisontal tertutup. Keadaan “tenang dan harmoni” jika diperiksa secara seksama, bukan diartikan kenyamanan dan perdamaian dalam arti positif dan riil, tetapi sebetulnya hegemoni dan stabilitas palsu karena dibangun dengan landasan rasa takut dan “kematian” aspirasi dari warganya.

Corak dan watak politik seperti itu harus dibayar mahal, yakni hilangnya kebebasan sipil dan terbonsainya masyarakat. Seolah-olah tidak ada konflik. Padahal konflik, dari cara pandang kritis ditafsir tidak sekadar perilaku, namun lebih dari itu adalah konteks struktural atau kondisi ekonomi politik yang ditandai oleh ketimpangan dan kesenjangan sosial, yang berkorelasi dengan sikap dan tindakan. (Galtung, dalam Lambang Trijono, 2007). Orde baru, dalam pengertian semacam ini, justru berisi konflik dan kekerasan terpendam (sifatnya struktural) yang demikian besar dan tidak teraktualisasikan.

Reformasi, dengan segala keterbatasan yang dikandungnya, telah menginvestasikan secara besar-besaran kebebasan media massa dan liberalisasi politik sebagai prasyarat demokrasi, yang keduanya telah berhasil membuka ruang bangunan komunikatif dan partisipatif. Pesona perubahan begitu terasa, ketika derajat partisipasi masyarakat meningkat serta kehendak melepas genggaman kuasa di aras pusat pemerintahan ke lokus daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Pintu pembuka bagi demokrasi lokal. (Arie Sujito, 2002). Daerah menjadi ajang kontestasi politik yang semakin marak, serta perangkat perubahan terpasang secara marak (Sutoro Eko, 2002), pemilihan dan pergantian kekuasaan di tingkat lokal menggunakan skema demokrasi langsung. (Nico Kana, 2004), sebagaimana saat ini tengah menjadi bagian episode reformasi.

Seiring ruang politik lokal, ekspresi partisipasi, inisiasi, dan hasrat berasosiasi meningkat, tidak heran jika urusan identitas kelompok juga mengemuka, dengan sulaman dan konstruksi politik identitas, atau bahkan sektarianisme. Misalnya kontestasi pemilihan umum, dan juga pemilihan kepala daerah di aras lokal tidak luput muncul politik identitas. Jika perspektif ini dikaitkan soal relasi antara kelompok, mulai dari yang positif dan negatif dengan segala risiko kecenderungan dampak dan kerawanan juga tak terhindarkan.

Mengikuti alur desentralisasi dan reformasi, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sesungguhnya secara normatif menjadi skema strategis demokratisasi. Rotasi kekuasaan yang dulunya melalui cara-cara oligarkhis dan elitis oleh DPRD sangat rawan terjadinya distorsi, manipulasi, bahkan jelas-jelas menenggelamkan aspirasi masyarakat luas. Melalui mekanisme pilkada langsung oleh masyarakat, diharapkan dan diasumsikan, akan terjadi negosiasi kepentingan serta terbangun ikatan kuat antara calon pemimpin dan yang memilihnya. Jika kontraktual terselenggara dengan baik dalam proses pilkada, maka para pemimpin terpilih dipastikan akan menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Dalam paham ini, desentralisasi dan demokratisasi, diharapkan mampu berpadu dengan produk kebijakan yang lebih berbasis aspirasi rakyat karena kewenangan makin mendarat di tingkat daerah.

Pendangkalan Politik

Sayangnya, proses 5 sampai 10 tahun terakhir ini membuktikan bahwa cita ideal semacam itu, terbukti meleset. Desentralisasi dan otonomi, serta demokratisasi hanya bergerak pada lintasan formal-prosedural (Demos, 2005). Skema kebijakan politik daerah, karena tidak berlangsung secara baik akhirnya justru menghasilkan karakter demokrasi oligarkhis, kental ditandai lahirnya aktor-aktor politik lokal berwatak dan bergaya *bosses*. Mereka itulah pelaku pembajakan dan membonceng arus perubahan di daerah. Para aktor politik lokal bergaya *boss* itu mempengaruhi dinamika masyarakat lalu menyeret politik pada tindakan konfliktual. Tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai kepentingannya dalam pilkada. Dari situlah, proses politik lokal event politik pilkada seringkali diwarnai bermacam sengketa, ketegangan, konflik

antar kelompok yang mengarah kekerasan. Kasus Tuban, Sulsel, Maluku Utara, Sampang Madura, Sulawesi Selatan, untuk menyebut beberapa daerah, bagian jejak konflikual penyelenggaraan kontestasi politik di arena elektoral. Dalam konteks itu pilkada terperosok pada langgam pragmatis, belum mampu sebagai mesin rotasi kekuasaan demokratisasi lokal.

Jika ditarik kedalam cara pandang makro, fakta-fakta konflik dan kekerasan tersebut kian memudahkan politik sebagai seni kekuasaan, dan sebaliknya politik dianggap arena yang syarat dengan manipulasi dan ketegangan. Ketidakpercayaan (*distrust*) begitu terasa teralamatkan pada institusi-institusi strategi seperti parpol dan parlemen, yang dinilai berkontribusi atas kegagalan penyelenggaraan demokrasi lokal secara damai dan bermartabat. Sinyalemen bahwa betapa besarnya biaya demokrasi baik itu berasal dari APBN maupun APBD, tetapi hasilnya dianggap murahan (Cornelis Lay, 2007). Demokrasi lokal menyusut, makin memiliki keterbatasan legitimasi. Soal-soal seperti ini hendaknya menjadi perhatian serius ditengah harapan agar kualitas demokrasi lokal dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Pilkada, dalam beberapa hal, seringkali menjadi pemicu konflik dan kekerasan di daerah. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, pengelompokan masyarakat berbasis etnik dan agama menjadi basis relasi dan kontestasi politik. Para calon gubernur, bupati, atau walikota menggunakan sentimen “sektarian” untuk memobilisasi, mendulang suara dalam pemilu. Betapapun hal ini dianggap wajar, sebagaimana juga terjadi di negara-negara lain, namun perbedaan kesadaran dan pemahaman soal kelompok melahirkan sentimen berbeda. Kemajemukan masyarakat seperti Indonesia, setelah sekian lama terbatas oleh tempurung konstruksi “state corporatism”, keyakinan perbedaan sebagai hal “yang lumrah” masih cukup terbatas ketika masuk arena politik. Toleransi perbedaan terbatas diantara kelompok masyarakat, karena akibat manajemen politik etnisitas masa lalu yang memelihara hubungan semu dalam wilayah SARA. Betapa rentannya struktur kemajemukan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pemilu dan pemilukada, potensi dan pengalaman nyata politisasi agama dan etnik menemukan momentum disatu sisi dalam struktur politik yang kian terbuka, disisi lain rapuhnya masyarakat yang diperlalat oligarkhi kekuasaan. Kondisi demikian bisa ditebak, jika akhirnya bukan partisipasi dalam arti kesadaran dalam politik, apalagi emansipasi (Heru Nugroho, 2003), namun hanyalah sebetuk mobilisasi tanpa kesadaran kritis. Fakta konflik dan kekerasan antar kelompok menjadi bukti terjadinya kesenjangan, antara set up kelembagaan dalam demokrasi (haluan liberal) dengan realitas kesadaran masyarakat sipil (Arie Sujito, 2007), yang berakibat makin merosotnya kualitas demokrasi (Demos, 2005).

Dapat dicatat secara kritis pula bahwa, demokratisasi Indonesia, paling tidak melahirkan dua kecenderungan ekstrim; liberalisme-kapitalisme (LK) di satu sisi, disisi lain sektarianisme-radikalisme (SR) identitas. Merosotnya kualitas demokrasi, yang ditandai proses yang bergerak pada lintasan formalis prosedural, ditandai penggerogotan berprosesnya secara liar korupsi politik, oligarkhi, dan mafia yang terus menyusutkan agenda reformasi dan konstitusionalisme. Faktanya, nasionalisme menjadi narasi semu, karena agenda kebangsaan terjebak pada pragmatisme kelompok dan agenda parokial yang melahirkan perubahan dangkal.

Secara bertahap terjadi marginalisasi sosial ekonomi yang dialami masyarakat kelas bawah, dan kelas menengah terus mengalami pembekuan dalam dua kutub (LK-SR) yang tarik ulur, sehingga civil society sebagai bagian agenda penting yang memilari demokrasi keindonesiaan kian menyempit. Elit politik dan ekonomi cenderung tidak peka, membiarkan realitas dangkal itu, sebagai bagian dari proses meneguhkan posisi masing-masing; tidak heran jika demokrasi dibajak dengan risiko yang dialami masyarakat luas.

Yogyakarta: resah dan harapan

Jika dilihat dalam konteks makro, dan kecenderungan analisis itu dipakai untuk mencermati Yogyakarta, tentu juga mengalami fenomena yang relatif sama dengan kecenderungan daerah-daerah lainnya. Ditinjau dari struktur masyarakatnya, kota Yogyakarta tergolong heterogen, dari latar belakang etnik, agama, kelompok kepentingan, bahkan kelas. Selain disebut sebagai kota pelajar, dimana para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia bermukim, kota Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya dan wisata. Predikat itu memberi imajinasi atas kota Yogyakarta yang identik dengan perkembangan peradaban dan serba dinamik. Apalagi dikaitkan dengan narasi keistimewaan. Dalam perjalanannya, Yogyakarta memang dikenal dalam konstruksi “aman”, dan relatif terbangun solidaritas sosial yang kuat dengan ditandai anti kekerasan. Dalam kacamata dari “luar”, kohesi sosial identik dengan kota Yogyakarta. Selain faktor budaya, terutama erat kaitannya dengan dominasi kultur Jawa yang disimbolisasi “kraton yogyakarta”, komunitas Yogyakarta sebagian besar diisi kaum menengah cendekiawan sebagai produk pendidikan tinggi yang demikian banyak. Sebut saja misalnya, di Yogyakarta demikian banyak asrama mahasiswa dari berbagai etnik di Indonesia, mereka kuliah di Yogyakarta.

Berkait dengan itulah, pertautan antara kultur Jawa yang “guyup rukun” memiliki *social capital* yang demikian kuat bertemu dengan konstruksi kaum menengah yang memiliki tingkat pengetahuan yang relatif tinggi. Karenanya, relasi antar kelompok relatif terbangun secara baik, nyaris tidak mudah tersulut pada konflik-kekerasan yang membawa keretakan sosial, sebagaimana dialami daerah-daerah plural lainnya. Betapapun disebut masyarakat majemuk, atau *plural society*, terbukti konflik-konflik yang berbau SARA tidak begitu terasa dan aktual. Faktor budaya dan kemampuan masyarakat adalah kekuatan yang cukup signifikan kohesi itu terbangun di Yogyakarta.

Proses pembangunan yang makin membawa suasana perubahan memang menjadi faktor yang mempengaruhi keadaan Yogyakarta saat ini dan dimasa mendatang. Justeru masalah konflik, dan juga kekerasan, dalam berbagai bentuk telah terjadi di Yogyakarta. Kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial, serta marginalisasi adalah masalah-masalah yang kian banyak dan makin dirasakan sebagai beban yang tidak ringan. Tantangan itulah nampaknya perlu diperhatikan secara serius dalam membangun Yogyakarta masa depan.

Begitu pula juga soal ketegangan kaitannya sentimen antar kelompok dengan balutan konstruksi “orang asli dan pendatang”, maupun reproduksi simbol-simbol etnis dan agama, yang dalam beberapa kasus menjadi masalah serius di Yogyakarta.

Rangkaian masalah beberapa tahun terakhir, menggambarkan terjadinya pergeseran struktur masyarakat Yogyakarta serta fragmentasi sosial yang tidak terkelola berpotensi melahirkan distorsi. Pengelompokan masyarakat dengan ragam corak yang difasilitasi ruang pembuka dan penghubung, sebaliknya justru ditandai menajamnya “pagar pembatas” dan memperkokoh sekat-sekat etnis dan agama, dengan berbagai bentuk ekspresi berdampak meluruhnya energi bersama membangun kebersamaan di masyarakat. Pluralisme, kebersamaan dan kohesi sosial terancam. Telah begitu banyak kasus-kasus terjadi di Yogyakarta, tetapi berlalu begitu saja meninggalkan bekas “goresan” dan tidak dituntaskan penyelesaiannya secara positif.

Apalagi, antara problem makro nasional dengan Yogyakarta juga seringkali berkaitan, bahkan tumpang tindih. Sebagaimana digambarkan terkait masalah perselisihan politik nasional dan lokal, ketegangan dalam arus perubahan sosial problem pembangunan, serta naiknya suhu sektarianisme dan politik identitas yang ditandai tumbuhnya kelompok-kelompok haluan garis keras dalam khasanah agama bertajuk fundamentalisme.

Berkenaan dengan fenomena gerakan ekspresi identitas keagamaan dan etnik yang berhaluan “keras” yang membanjiri khasanah perubahan sosial menjadi masalah serius selain fundamentalisme pasar yang kian anarkhi. Jika proses ini berlarut-larut, maka Indonesia hanyalah menjadi panggung ketegangan dua kutub terbut; ironisnya

pembiasaan merespon masalah tersebut selalu bersifat darurat, reaksioner dan tidak mendasar dalam mengatasinya.

Agenda kedepan

Kita perlu memastikan bahwa antara pendekatan struktural dan kultural, dalam memahami dan membangun pluralisme maupun multikultural perlu dipadukan. Agenda penting yang perlu diwujudkan adalah perpaduan antara terciptanya keadilan sosial dan memperkuat tradisi “karakter keindonesiaan”. Hal demikian bukan sebatas mereproduksi sekadar jargon dalam tajuk Pancasila dan historisitas romantik, namun harus praksis. Cita-cita konstitusionalisme yang menurunkan narasi besar dalam kebijakan yang berorientasi keadilan sosial harus bisa dirasakan masyarakat Indonesia untuk mengatasi ketimpangan dan marginalisasi kelas sosial.

Sementara pada basis kebudayaan, mengembalikan dan merevitalisasi “tradisi masyarakat” diwujudkan dalam bentuk memperluas dan memperdalam arena, diskursus dan praktik lokal. Tantangan serius yang perlu dijawab; bagaimana menerjemahkan masalah sektarianisme dan radikalisme identitas dengan mengaitkan pada masalah pokok; mengoreksi dan mengubah pendekatan atau strategi pembangunan (sosial ekonomi), membenahi politik kebijakan, serta memperkuat kembali ruang lokal yang dapat difungsikan sebagai arena konstestasi nilai; menghadirkan kultur dialog melampaui dari kepentingan kelompok.

Keindonesiaan berarti membangun kembali semangat solidaritas sosial, penghargaan pada nilai-nilai bersama, dan menumbuhkan identitas bersama “keadilan dan tradisi nasionalitas” yang otentik, memiliki kaitan konstitusional dan memiliki makna penghargaan pada akar tradisi sosial.

Pilihan strategis dan agenda perpaduan antara keadilan dan memperkuat tradisi sosial juga relevan secara praksis diturunkan dalam kerangka mengelola Yogyakarta; masyarakat yang berkeadilan ditandai kebijakan pembangunan yang mampu mengatasi marginalisasi sosial ekonomi, ramah lingkungan, pemerintahan dan lembaga hukum yang kredibel. Sementara dalam memperkuat tradisi lokal berarti mengembangkan kembali semangat dialog, kegotongroyongan, ramah dan toleran, menyuarakan misi kemanusiaan dalam praktik budaya dan edukasi sosial keseharian. Itulah cita-cita gambaran Yogyakarta Istimewa: mewujudkan secara nyata suasana berkeadilan dan penghargaan tradisi sosial. (***)